

Efektivitas Kebijakan Perbaikan Infrastruktur Jalan dalam Mendukung Pelayanan Publik di Kota Bandung

Ahmad Silan Ghibrani¹, Rosa Maria Rostandi²

¹Nama Jurusan/Prodi, Nama Fakultas, Nama Kampus, Kota Kampus, Negara Kampus

^{1,2} Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: ahmadsilan06@gmail.com

Keywords:

Road Infrastructure
 Public Services
 Public Policy
 The City of Bandung

Abstract: Road infrastructure plays a crucial role in supporting public services and community mobility. Bandung still faces various road-related issues, such as infrastructure damage and traffic congestion, which affect the quality of public services. This study aims to analyze the effectiveness of road infrastructure improvement policies in supporting public services in the city of Bandung. The study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that road improvement policies have a positive impact on accessibility, mobility, and public comfort. However, their implementation still faces challenges such as budget constraints and high vehicle volume. Thus, road infrastructure improvement policies in Bandung are deemed sufficiently effective in supporting public services, although enhanced oversight and equitable infrastructure development are still needed.

Kata Kunci:

Infrastruktur Jalan
 Pelayanan Publik
 Kebijakan Publik
 Kota Bandung

Abstrak: Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan mobilitas masyarakat. Bandung masih menghadapi berbagai permasalahan jalan, seperti kerusakan infrastruktur dan kemacetan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan dalam mendukung pelayanan publik di Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan jalan memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas, kelancaran mobilitas, dan kenyamanan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan tingginya volume kendaraan. Dengan demikian, kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bandung dinilai cukup efektif dalam mendukung pelayanan publik, meskipun masih diperlukan peningkatan pengawasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi dan mobilitas masyarakat, jalan juga menjadi faktor pendukung bagi kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Kondisi infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, mengurangi tingkat kecelakaan, serta memperlancar konektivitas antarwilayah. Sebaliknya, kerusakan jalan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, keterlambatan distribusi, hingga menurunnya kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Sarpono, 2025)

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Bandung memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, yang secara langsung memberikan tekanan terhadap kualitas dan daya dukung infrastruktur jalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan kendaraan bermotor di kawasan perkotaan terus mengalami peningkatan sehingga berdampak pada bertambahnya volume lalu lintas serta mempercepat penurunan kondisi jalan. Kondisi tersebut menjadikan pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan guna menunjang kelancaran pelayanan publik serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. (Neni, 2024)

Melalui berbagai program perbaikan jalan, Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian, implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya anggaran, tingginya intensitas penggunaan jalan oleh masyarakat, serta faktor cuaca yang dapat memengaruhi efektivitas dan kelancaran proses perbaikan jalan. Selain itu, masyarakat masih sering menyampaikan keluhan terkait jalan berlubang, kemacetan, dan lambatnya penanganan infrastruktur di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perbaikan jalan masih menjadi isu

yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. (Dr. Hardiyansyah, M.Si., 2018)

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Infrastruktur yang memadai dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih optimal karena masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah, aman, dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perbaikan jalan dapat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. (Lexy J. Moleong, 2018)

Penelitian ini penting dilakukan karena perbaikan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas kebijakan perbaikan jalan di Kota Bandung masih relevan untuk dikembangkan mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan kompleksitas permasalahan transportasi perkotaan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam mendukung pelayanan publik di Kota Bandung. (Sugiyono, 2021)

Tinjauan Literatur

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Konsep tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan pemerintah, termasuk dalam

pembangunan infrastruktur, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan publik. (Addawiyah Addawiyah et al., 2025)

Dalam implementasinya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari perencanaan program, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Simatupang dan Akib menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik dapat diukur melalui pencapaian tujuan, manfaat program, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran. Hal ini berarti kebijakan perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat secara langsung. (Dr. Hardiyansyah, M.Si., 2018)

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secara efektif. Oleh karena itu, kebijakan perbaikan infrastruktur jalan memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal. (Heryanto Monoarfa, n.d.)

2. Infrastruktur Jalan dan Pelayanan Publik

Infrastruktur jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Jalan berfungsi sebagai sarana mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta penghubung antarwilayah yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan menciptakan aksesibilitas yang lebih mudah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sebaliknya, kerusakan jalan dapat menghambat aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah. (Pujo Santoso, n.d.)

Bandung sebagai kota dengan tingkat mobilitas tinggi menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat menyebabkan kepadatan lalu lintas dan mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam

menggunakan fasilitas publik. Dalam penelitian mengenai transportasi publik di Bandung, masyarakat menilai bahwa kemacetan, jalan rusak, dan kurang tertatanya fasilitas transportasi menjadi permasalahan utama yang memengaruhi mobilitas sehari-hari. (Simatupang & Akib, 2015)

Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Monoarfa, efektivitas pelayanan publik dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efisien, tepat sasaran, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang transportasi dan mobilitas masyarakat perkotaan. (Sugiyono, 2021)

3. Efektivitas Kebijakan Perbaikan Infrastruktur Jalan

Efektivitas kebijakan merupakan ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan jalan, efektivitas kebijakan dapat dilihat dari kualitas hasil pembangunan, ketepatan sasaran program, serta dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan yang efektif akan menghasilkan perubahan yang nyata, seperti meningkatnya aksesibilitas, berkurangnya hambatan mobilitas, dan meningkatnya kenyamanan pengguna jalan. (Zahrah N. A, 2021)

Penelitian mengenai implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan jalan masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, perubahan prioritas pembangunan, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak. Selain itu, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Penelitian tentang transparansi penyediaan infrastruktur publik di Bandung Raya menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Infrastruktur

jalan yang baik pada akhirnya akan mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas kebijakan infrastruktur dan pelayanan publik telah banyak dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Ningtias (2022) mengenai implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas pembangunan. Penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek implementasi anggaran infrastruktur jalan.

Kedua, penelitian oleh Zahrah (2021) mengenai efektivitas proyek infrastruktur publik Teras Cihampelas Skywalk di Bandung menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur publik memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas proyek infrastruktur wisata perkotaan dan belum membahas pelayanan publik secara spesifik dalam konteks perbaikan jalan.

Ketiga, penelitian Addawiyah dkk. (2024) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi literatur dan belum mengkaji secara langsung implementasi kebijakan infrastruktur jalan pada tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian sebelumnya cenderung membahas implementasi anggaran, proyek infrastruktur tertentu, dan efektivitas pelayanan publik secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan dalam mendukung pelayanan publik di Bandung dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara kebijakan perbaikan jalan dan kualitas pelayanan publik masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Bandung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan dalam menunjang pelayanan publik di Bandung. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, proses implementasi kebijakan, serta tanggapan masyarakat terhadap program perbaikan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami berbagai fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan menyajikannya dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa pada lingkungan yang berlangsung secara alami. (Dr. Hardiyansyah, M.Si., 2018)

Metode deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran mengenai fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap proses implementasi kebijakan serta implikasinya terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pendekatan deskriptif dianggap relevan karena mampu memberikan penjelasan secara rinci mengenai efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bandung.

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Kota Bandung yang menjadi sasaran program perbaikan jalan serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan infrastruktur, seperti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Bandung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya mobilitas masyarakat serta masih ditemukannya berbagai persoalan infrastruktur jalan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. (Miles et al., 2014)

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui observasi di lapangan serta wawancara

dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti pegawai instansi terkait, masyarakat pengguna jalan, dan pengemudi transportasi umum maupun transportasi daring. Adapun data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen pendukung, seperti dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta data statistik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemanfaatan kedua sumber data tersebut dilakukan untuk memperkaya informasi penelitian serta meningkatkan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh. (Moleong, 2017)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung kondisi infrastruktur jalan serta aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Adapun dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian yang mencakup arsip, laporan, foto, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan perbaikan jalan. (Sugiyono, 2021)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi serta menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah diolah disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan kedua teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil Penelitian

1 Gambaran Umum Infrastruktur Jalan di Kota Bandung

Bandung merupakan salah satu kota metropolitan dengan tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk, kendaraan bermotor, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan terus meningkat setiap tahunnya. Jalan memiliki peran penting sebagai sarana mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya. Namun, tingginya intensitas penggunaan jalan juga berdampak pada meningkatnya kerusakan infrastruktur di beberapa wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah kendaraan bermotor di wilayah perkotaan Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahun yang berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan. Pemerintah Kota Bandung melalui program pemeliharaan dan perbaikan jalan berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Program tersebut dilakukan melalui perbaikan jalan berlubang, peningkatan kualitas aspal, serta pemeliharaan jalan di beberapa titik strategis yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Tabel berikut menunjukkan gambaran kondisi infrastruktur jalan dan pelayanan publik di Kota Bandung berdasarkan hasil observasi lapangan dan data pemerintah daerah.

Aspek Pengamatan	Kondisi di Lapangan	Dampak terhadap Pelayanan Publik
Kondisi jalan utama	Sebagian besar baik, namun terdapat beberapa jalan rusak	Menghambat mobilitas masyarakat
Tingkat kemacetan	Tinggi pada jam sibuk	Waktu tempuh pelayanan menjadi lebih lama
Perbaikan jalan	Dilakukan secara bertahap	Membantu meningkatkan kenyamanan pengguna jalan

Mobilitas masyarakat	Sangat tinggi	Membutuhkan infrastruktur yang memadai
-----------------------------	---------------	--

sumber : diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi jalan di Kota Bandung secara umum sudah mengalami peningkatan melalui program perbaikan pemerintah daerah. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga memengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Perbaikan Infrastruktur Jalan

Pelaksanaan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bandung dilakukan melalui berbagai program pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh pemerintah daerah. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jalan, sebagian besar responden menilai bahwa perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah cukup membantu mengurangi hambatan mobilitas, terutama di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. (Dr. Hardiyansyah, M.Si., 2018)

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan perbaikan jalan secara berkala pada titik-titik yang dianggap rawan kerusakan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Bandung sebagai pelaksana utama program infrastruktur jalan. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana transportasi yang lebih baik. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa proses perbaikan jalan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah tingginya volume kendaraan yang menyebabkan kerusakan jalan terjadi lebih cepat. Selain itu, kondisi cuaca dan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program perbaikan jalan di Kota Bandung.

3. Efektivitas Kebijakan dalam Mendukung Pelayanan Publik

Efektivitas kebijakan perbaikan infrastruktur jalan dapat dilihat dari dampaknya terhadap pelayanan publik dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas jalan. Jalan yang lebih baik membantu memperlancar mobilitas masyarakat sehingga waktu tempuh menjadi lebih efisien. (Miles et al., 2014)

Hasil wawancara dengan beberapa pengguna jalan menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya perubahan kondisi jalan yang lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Perbaikan jalan juga dinilai membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan berlubang serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan perbaikan jalan memiliki hubungan yang cukup erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung.

Berikut merupakan hasil temuan penelitian terkait efektivitas kebijakan perbaikan jalan.

Indikator Efektivitas	Hasil Temuan
Ketepatan sasaran	Perbaikan difokuskan pada jalan dengan mobilitas tinggi
Dampak terhadap masyarakat	Mobilitas dan kenyamanan meningkat
Kualitas pelayanan publik	Akses masyarakat menjadi lebih mudah
Hambatan kebijakan	Anggaran, cuaca, dan kepadatan kendaraan

sumber : diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan perbaikan infrastruktur jalan telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan

Keberhasilan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama dalam penelitian ini adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur serta dukungan masyarakat terhadap program perbaikan jalan. Selain itu, perkembangan teknologi konstruksi juga membantu proses pembangunan jalan menjadi lebih efektif dan efisien. (Moleong, 2017)

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tingginya volume kendaraan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang terjadi secara cepat. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan proses perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh pada seluruh wilayah Kota Bandung. Faktor cuaca juga memengaruhi proses pembangunan karena curah hujan yang tinggi dapat menghambat pelaksanaan proyek perbaikan jalan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bandung sudah berjalan cukup baik dalam mendukung pelayanan publik. Namun, diperlukan pengawasan yang lebih optimal, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pemeliharaan jalan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. (Sugiyono, 2021)

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Bandung memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan kenyamanan pengguna jalan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik, tetapi juga berhubungan langsung dengan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jalan yang layak dan mudah diakses mampu mempercepat aktivitas sosial maupun ekonomi sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Dalam konteks administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa

infrastruktur merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Temuan penelitian ini mendukung teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada pelaksanaan kebijakan perbaikan jalan di Kota Bandung, komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat terlihat melalui penyampaian informasi mengenai perbaikan jalan serta respons terhadap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur. Selain itu, dukungan sumber daya berupa anggaran dan tenaga teknis juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan jalan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan tingginya mobilitas kendaraan masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan secara maksimal. (Edward III, 1980)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat merasakan adanya peningkatan kenyamanan dan efisiensi waktu perjalanan setelah dilakukan perbaikan jalan di beberapa wilayah Kota Bandung. Kondisi tersebut memperkuat pendapat Hardiansyah (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, akses masyarakat terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dijangkau. (Dr. Hardiyansyah, M.Si., 2018)

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso dan Ningtias (2022) mengenai implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan jalan dipengaruhi oleh faktor anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut karena dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Bandung juga menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada proses pemerataan pembangunan jalan. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada hubungan antara kebijakan perbaikan jalan dan

pelayanan publik masyarakat perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif tambahan mengenai pentingnya infrastruktur jalan sebagai penunjang kualitas pelayanan publik di wilayah perkotaan. (Santoso & Ningtias, 2022)

Selain memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan beberapa permasalahan yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tingginya volume kendaraan dan pertumbuhan mobilitas masyarakat menyebabkan kerusakan jalan terjadi lebih cepat dibandingkan proses pemeliharaan yang dilakukan pemerintah. Faktor cuaca dan drainase yang kurang optimal juga menjadi penyebab kerusakan jalan di beberapa wilayah Kota Bandung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses pembangunan, tetapi juga oleh keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan secara konsisten.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pembangunan jalan serta memperkuat sistem pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik agar kondisi jalan tetap terawat dengan baik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi dan material pembangunan yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca dan tingginya intensitas kendaraan di kawasan perkotaan. (Sugiyono, 2021)

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada wilayah Kota Bandung dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses pengumpulan data lapangan belum mencakup seluruh wilayah yang mengalami perbaikan infrastruktur jalan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai tingkat efektivitas kebijakan perbaikan jalan. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah penelitian serta membandingkan implementasi kebijakan infrastruktur di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, kajian mengenai efektivitas kebijakan infrastruktur jalan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pembangunan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Bandung secara umum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelayanan publik. Perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta kenyamanan pengguna jalan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berjalan lebih optimal.

Pelaksanaan kebijakan perbaikan jalan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara bertahap. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, tingginya volume kendaraan, serta faktor cuaca yang memengaruhi kondisi jalan di beberapa wilayah. Selain itu, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan secara berkelanjutan agar kualitas infrastruktur tetap terjaga dengan baik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas publik. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan mobilitas diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas

pembangunan dan pemeliharaan jalan secara merata agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan perencanaan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan infrastruktur yang dijalankan mampu memberikan dampak yang lebih optimal bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, & Nurul Fadillah. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik transportasi darat Indonesia*. BPS Indonesia.
- Dr. Hardiyansyah, M.Si. (2018). *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK*.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Heryanto Monoarfa. (n.d.). *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.*
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Neni, Kusniati. S. T. . . M. T. (2024). *RENCANA STRATEGIS BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN 2020 – 2024*.
- Pujo Santoso, I. S. N. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*.

- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). Implementasi kebijakan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2).
- Sarpono. (2025). *STATISTIK TRANSPORTASI DARAT* (Vol. 10). Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2015). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* / Sugiyono.
- Zahrah N. A, D. (2021). *Identifikasi efektivitas proyek infrastruktur publik Teras Cihampelas Skywalk Kota Bandung*.
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13448>